

**DISKURSUS FENOMENA LOCAL LOCKDOWN: SEBUAH AKSI PROTES  
MASYARAKAT DI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH**

**Sugiyanto**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Email: [ugesugiyanto@gmail.com](mailto:ugesugiyanto@gmail.com)

**Abstract**

*The purpose of this study is to examine the issue of local lockdowns carried out by people in various regions in Indonesia, as has been done by other countries. The research method used by the author is qualitative with a literature study approach. The results of the study show that people carry out local lockdowns as a form of anticipation of the spread of the Covid-19 virus. The implementation of local lockdowns carried out by the community as a result of the media reporting on lockdown activities in other countries, such as China. On the one hand, people feel that the Indonesian government is not ready to anticipate the spread of the virus. The public is aware of information that the lockdown can only be enforced with the permission of the Central Government. However, the health factor is more important because the state is considered unable to guarantee people's lives during the outbreak. The government itself does not guarantee about stopping the spread of the Covid-19 virus.*

**Keyword:** *Policy; Local Lockdown; Guarantee.*

## Pendahuluan

Pandemik Covid-19 atau virus corona memberikan nuansa yang sangat berbeda terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat merasakan kecemasan yang luar biasa terhadap wabah tersebut. Di Indonesia, kasus pertama penduduk yang terinfeksi virus corona, yaitu satu keluarga ibu dan putrinya pada tanggal 16 Februari dari Depok, Jawa Barat, pasca bertemu dengan temannya dari Jepang (Ihsanuddin, 2020). Setelah itu, mulai bermunculan kasus-kasus berikutnya di berbagai daerah di tanah air.

**Tabel 1. Penduduk Positif Corona di Indonesia Tahun 2020**

Bulan	Jumlah Positif	Tewas	Sembuh
29 Februari	2	-	-
31 Maret	1.528	136	81
15 April	5.136	469	446
30 April	10.118	792	1.522

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2020.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, tentu saja meningkatkan rasa kekhawatiran bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Bahkan, mulai bermunculan reaksi terhadap kasus tersebut. Salah satu bentuk reaksi terhadap pencegahan penyebaran wabah Covid-19 adalah mengambil tindakan *local lockdown* (karantina wilayah). Di beberapa daerah Indonesia telah menunjukkan adanya pelaksanaan *local lockdown*, seperti Kota Tegal (per 30 Maret selama 1 bulan), Tasikmalaya (per 31 Maret selama 1 bulan), Kabupaten Ciamis (per 31 Maret selama 1 bulan). Ironisnya Pemerintah dalam skala nasional menolak adanya *lockdown* seperti yang dilakukan sejumlah negara, diantaranya: China, Denmark, Irlandia, dan sebagainya. Pemerintah justru memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, terdapat perbedaan definisi antara *local lockdown* dan PSBB.

Dalam UU No. 6 Tahun 2018, PSBB diartikan sebagai bentuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sementara itu, karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. *Lockdown* juga diartikan sebagai sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah kawasan secara bebas karena sedang dalam kondisi darurat (Cambridge

dalam Kennedy, dkk, 2020:49). Perbedaan dari keduanya terletak pada masih diperbolehkannya beraktivitas masyarakat dalam kebijakan PSBB dengan lingkup kecil, sementara dalam *lockdown* tidak diperbolehkan, bahkan tidak diperkenankan untuk berkunjung atau keluar daerah lainnya.

Saat Pemerintah mengumumkan memilih untuk mengambil kebijakan PSBB bukan *lockdown*, beberapa daerah merasa khawatir sehingga muncullah *local lockdown*, yaitu *lockdown* yang dilakukan di beberapa kota/kabupaten di Indonesia. *Local lockdown* ini diambil langsung oleh kepala daerah di beberapa wilayah Indonesia. Misalkan saja, Wali Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan tersebut pada tanggal 31 Maret 2020 pasca diketahui terdapat lima orang positif Covid-19 (Dzulfaroh, 2020). Salah satu langkahnya adalah melarang seluruh angkutan umum atau sarana transportasi memasuki wilayah Kota Tasikmalaya. Sementara di Kota Tegal, pelaksanaan *local lockdown* dilakukan dengan sejumlah akses keluar dan masuk kota tersebut ditutup menggunakan pagar beton (diakses dalam [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Kemunculan *local lockdown* ini menimbulkan asumsi ada ketidakpercayaan masyarakat di daerah terhadap keputusan pemerintah dalam mengambil keputusan PSBB. Oleh sebab itu, penulis berupaya mengupas terhadap fenomena *local lockdown* yang dianggap sebagai aksi protes masyarakat di daerah terhadap kebijakan Pemerintah.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan berbagai literatur, baik hasil riset maupun artikel lainnya (buku, surat kabar, dokumen pribadi, dan lain-lain) yang relevan. Menurut Zed (2003) dalam Supriyadi (2016:85), studi pustaka dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dengan demikian, penelusuran pustaka perannya lebih daripada persiapan kerangka penelitian dan peneliti tidak melakukan penelitian lapangan.

## **Pembahasan**

Pemerintah menolak terhadap keputusan *local lockdown* meskipun telah menerima masukan dari berbagai daerah. Pemerintah justru lebih memilih alternatif PSBB yang masih berpeluang terhadap penyebaran virus corona. Presiden Jokowi dalam sebuah pers mengatakan bahwa akan mengganggu perekonomian baik nasional maupun daerah karena semua kegiatan termasuk mobilisasi dihentikan sehingga aktivitas ekonomipun terhenti (Ihsanuddin, 2020). Dengan pertimbangan laju ekonomi, pertimbangan PSBB menjadi opsi yang tepat.

Nugraha (2020) menyebutkan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan tidak melakukan *lockdown* tetapi PSBB karena karakter seperti budaya dan kedisiplinan di Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Bahkan, faktor ekonomi juga menjadi alasan lainnya. Penerapan PSBB di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Meski telah mengambil keputusan PSBB, namun belum mampu menenangkan masyarakat karena pada kenyataannya setiap hari terjadi peningkatan warga yang terkonfirmasi kasus Covid-19 di berbagai daerah. Bahkan, daerah terpencil memiliki resiko besar apabila terpapar Covid-19 karena keterbatasan fasilitas kesehatan (Djalante, et al, 2020 dalam Nugraha, 2020).

Pengambilan keputusan PSBB justru bagi sebagian daerah di Indonesia masih memberikan rasa khawatir terlebih kepala daerah terhadap masyarakatnya. Oleh sebab itu, banyak pula daerah yang mengambil keputusan *local lockdown*. Namun dengan, melihat dasar hukum UU No. 6 Tahun 2018 bahwa kebijakan *lockdown* baik di tingkat nasional maupun daerah hanya boleh diambil oleh pemerintah, bukan ditangan pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi dalam artikel di bawah ini:

“Kebijakan *lockdown* baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan *lockdown* – Presiden Jokowi” (Ihsanuddin, 2020).

Dalam artikel yang ditulis oleh Ihsanuddin (2020), dinyatakan bahwa Indonesia dan sejumlah negara lainnya yang mengambil *lockdown* tentu perlu ada perbedaan pengambilan kebijakan. Hal ini karena dipengaruhi oleh karakter, budaya, disiplin yang berbeda-beda antara negara Indonesia dengan negara lainnya. Faktor kurangnya mobilitas ekonomi di berbagai daerah menjadi faktor utama dalam ketidaksiapan Indonesia menggunakan sistem *lockdown*. Dalam hal ini, ada dua pertimbangan mana yang perlu diupayakan, yaitu keselamatan warga atau ekonomi wilayah yang menyangkut pula pada kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari wabah tersebut.

Kasus *lockdown* di Wuhan, Tiongkok memberikan dampak nyatanya pada sektor perekonomian, yaitu kehilangan lebih dari 1,3 triliun yuan atau setara Rp. 2.685 triliun dalam dua bulan pertama tahun 2020 (Brilianto dkk, 2020). Hal ini dikarenakan berhentinya sektor konsumsi yang kehilangan sebesar Rp. 817,8 triliun dan industri pariwisata sebesar Rp. 1.753 triliun di bulan Januari dan Februari. Berdasarkan pertimbangan melusunya sektor perekonomian yang tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat inilah menyebabkan pemerintah enggan menerapkan *lockdown*.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis bahwa ada pengaruh pelaksanaan *lockdown* terhadap jumlah penduduk yang terkena positif Covid-19. Berikut data yang bisa penulis tunjukkan beberapa contoh kota yang menerapkan *lockdown* dan yang tidak menerapkan sebagai perbandingan.

**Tabel 2. Perbedaan Jumlah Penduduk Positif Covid-19 di berbagai Kota**

Waktu	Nasional	Kota yang menerapkan <i>lockdown</i>		Kota yang tidak menerapkan <i>lockdown</i>	
		Tegal	Tasikmalaya	Jakarta	Semarang
10 April	3.512	4	10	1719	22
20 April	6.760	6	17	3112	123
30 April	10.118	0	29	4138	118

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, ada pengaruh positif terhadap pelaksanaan *lockdown* dengan kasus Covid-19. Dengan melihat perbandingan antara kota yang menerapkan *lockdown* (Kota Tegal dan Kota Tasikmalaya) dan yang tidak menerapkan (Kota Jakarta dan Kota Semarang) tampak perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat dari jumlah kasusnya, kota yang menerapkan kebijakan *lockdown* cenderung jumlah kasusnya sedikit meskipun bisa ada penambahan tetapi tidak signifikan. Sementara kota yang tidak menerapkan *lockdown* justru jumlah kasusnya tergolong lebih tinggi bahkan bisa berkali lipat dengan kota yang menerapkan *lockdown*. Dengan demikian, kebijakan *lockdown* terbukti efektif menekan terjadinya mobilisasi penduduk, seperti halnya di Wuhan, Tiongkok.

Kesehatan penduduk menjadi pertimbangan prioritas bagi daerah dalam mengambil tindakan *local lockdown*. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Kota Tegal. Meski demikian, Walikota Tegal menolak daerahnya dicap telah melawan kebijakan dari Pusat, kebijakan

*lockdown* terpaksa ditempuh karena salah satu warganya positif terpapar virus corona (dilansir dalam [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Dengan pertimbangan bahwa terdapat satu dari warganya yang positif, maka Walikota Tegal menerapkan *local lockdown*. Tentu saja hal tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan lebih luas ke warga lainnya.

Dalam menyelenggarakan *lockdown*, Pemerintah Kota Tegal lebih terfokus pada pertimbangan kesehatan dibandingkan ekonomi sebagaimana dikutip dalam artikel Afriyadi (2020). Padahal, dalam kebijakan *lockdown* diperlukan kesiapan matang terhadap ketersediaan pangan (logistik). Afriyadi (2020) menambahkan pula bahwa dengan menerapkan *lockdown* di Kota Tegal, tentu ekonominya akan menurun karena aktivitasnya menyusut. Sementara itu, dampak secara nasional sangat kecil karena kontribusi perekonomian Kota Tegal terhadap nasional juga kecil.

Berdasarkan data dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, kontribusi PDRB Kota Tegal terhadap provinsi tahun 2017, 2018, dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Kontribusi PRDB Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah (%)**

	2017	2018	2019
Kota Tegal	1,11	1,12	1,13
Kota Semarang	13,82	14,06	14,05
Kabupaten Cilacap	8,65	8,38	7,8

Sumber: diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020.

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi pembulatan pendapatan dari Kota Tegal sendiri hanya sebesar 1 persen kepada Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, logikanya semakin sedikit pula kontribusi ekonomi Kota Tegal terhadap lingkup yang lebih luas dalam hal ini adalah Pemerintah. Peneliti melihat bahwa dengan kontribusi terhadap Pemerintah yang kecil, maka Pemerintah Kota Tegal lebih leluasa untuk melakukan *local lockdown* dibandingkan dengan Kota Semarang. Hal ini dikarenakan dampak aksi *local lockdown* tersebut tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian secara nasional.

Pada dasarnya pertimbangan kesehatan masyarakat menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, seperti halnya Kota Tegal dalam mengambil kebijakan *local lockdown*. Dalam hal ini, pemerintah belum memiliki keputusan pasti dalam menanggulangi penyebaran virus *Covid-19*. Oleh sebab itu, dengan melihat tindakan Tiongkok yang melakukan *lockdown* maka itu

memberikan inisiasi bagi pemerintah daerah juga. Pemerintah dianggap lamban dalam memberikan keputusan terhadap masalah penyebaran Covid-19.

Pemerintah daerah didesak oleh masyarakat untuk mengambil tindakan menenangkan keresahan masyarakat di lingkungannya. Pemerintah daerah dianggap memiliki hubungan dekat dengan masyarakat lokal sehingga diharapkan lebih cepat peka dan tanggap terhadap keinginan masyarakat. Keresahan yang dialami oleh masyarakat tentu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah dalam menyikapi hal tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah merasa dilema terhadap keinginan cepat tanggap dari masyarakat atau masih menunggu keputusan dari Pemerintah. Tentu saja masyarakat berharap upaya cepat tanggap untuk menghalau penyebaran virus tersebut ke dalam lingkungannya. Bahkan, berdasarkan pengalaman Provinsi Wuhan yang telah menerapkan *lockdown* tetapi penyebaran virus tersebut tidak dapat dihalau lagi (Nugraha, 2020). Bahkan setelah Tiongkok, beberapa negara lainnya juga menerapkan kebijakan *lockdown* seperti Spanyol, Italia, Malaysia, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Menurut Lin, et al (2020) dalam Nugraha (2020), penerapan *lockdown* merupakan hasil tinjauan dari kasus pandemi di masa lalu dengan harapan masyarakat dapat melakukan tindakan isolasi diri atau karantina diri dalam rumah guna menghindari penularan virus ini.

Kebijakan *lockdown* yang dilakukan oleh berbagai negara yang disiarkan melalui berita televisi maupun media sosial turut serta menambah keresahan masyarakat. Rasa takut masyarakat yang semakin meningkat sebagai dampak dari pemberitaan yang dibesarkan oleh media. Menurut Valkenburg, Peter, & Walther (2016:8) pemberitaan di media berpotensi memberikan pengaruh terhadap psikologi, kepercayaan, dan sosial individual. Maksudnya adalah apa yang ditayangkan baik sekali maupun berkali-kali oleh media akan berdampak pada pemikiran masyarakat. Dari hasil pemikiran inilah yang akan berkembang pada sisi psikologi, kepercayaan, dan aktivitas sosial dai inividu yang berpotensi berkembang menjadi kelompok. Dengan demikian, apa yang ditayangkan oleh media memberikan rasa ketakutan kepada masyarakat sehingga pemberitaan pengalaman di Tiongkok menggiring opini publik untuk melakukan *lockdown*.

Kebijakan *lockdown* baik skala nasional maupun lokal dianggap sebagai salah satu cara efektif, bagi masyarakat dalam menutup diri dan terhindar dari mobilisasi virus Covid-19. Namun demikian, masyarakat menganggap bahwa kebijakan terus tidak berdampak pada lesunya perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan lebih memprioritaskan faktor kesehatan. Padahal bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentu kebijakan ini jika dilangsungkan

dengan durasi waktu yang lama maka akan memberikan efek pada pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Masyarakat menganggap generalisasi perlakuan terhadap semua individual tanpa melihat mata pencahariannya. Misalkan seseorang pekerja informal pasti berbeda menanggapi Covid-19 dan *lockdown* dengan pekerja formal yang mendapatkan gaji tetap tiap bulannya oleh institusi, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terjadi karena perbedaan sumber penghasilan, besaran, dan tetap tidaknya jumlah uang yang diterima secara periodik.

Pemberlakuan *lockdown* tentu akan sangat berimbas pada para pekerja informal, misalkan pedagang. Bila kebijakan tersebut dilaksanakan, maka yang akan terjadi pedagang tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan selama durasi *lockdown* diberlakukan. Beberapa sektor yang teras dengan membutuhkan massa tenaga kerja, antara lain: industri, pariwisata, jasa, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Setiap sektor yang disebutkan merupakan sektor yang menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Oleh sebab itu, pertimbangan jaminan distribusi dan keamanan makanan yang diberikan dari negara terhadap masyarakat menjadi isu utama bila kebijakan *lockdown* diberlakukan sebagaimana pendapat dari Choudhury, *et al* (2020:2). Dengan demikian mulai muncul pertanyaan bagaimana negara mampu memberikan jaminan kesejahteraan terutama terkait pangan bagi masyarakat.

Di Tiongkok yang memberlakukan *lockdown* mampu menanggung kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Hal ini sebagai bentuk jaminan kehidupan masyarakat bagi yang patuh mengikuti anjuran masyarakat untuk tetap tinggal di rumah saja. Selain itu, sektor-sektor mata pencaharian benar-benar berhenti sehingga memberikan dukungan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19.

## **Penutup**

Masyarakat membutuhkan kepastian dalam menghadapi ketakutan penyebaran virus Covid-19. Sikap ketakutan masyarakat dan ketidaksiapan pemerintah dalam mencegah terjadinya penyebaran virus tersebut menjadi faktor utama terjadinya *local lockdown*. Hal ini sebagai bentuk protes yang wajar dilakukan masyarakat di berbagai daerah Indonesia, terkait dengan kesehatan. Negara belum mampu hadir dalam menenangkan masyarakat yang dilema terhadap ketakutan atas wabah yang dihadapinya. Masyarakat melakukan *local lockdown* sebagai upaya tidak adanya penyebaran virus ke lingkungannya, terutama para pendatang. Di sisi lain,



media yang selalu menayangkan kondisi yang semakin memburuk di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

## Daftar Pustaka

- Afriyadi, A, D. 2020. "Tegal Lockdown, Ekonom: Wali Kota Harus Siapkan Logistik dan Bantuan". Diakses dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4955021/tegal-lockdown-ekonom-wali-kota-harus-siapkan-logistik-dan-bantuan>, pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 10:04 WIB.
- , 2020. "Tegal Lockdown, Ini Dampaknya ke Ekonomi". Diakses dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4954991/tegal-lockdown-ini-dampaknya-ke-ekonomi>, pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 10:13 WIB.
- Badan Pusat Statistik. 2020. "Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Persen), 2010-2020". Diakses dalam <https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/13/1412/-seri-2010-distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-persen-2010---2020.html>, pada tanggal 1 April 2020, pukul 10:57 WIB.
- Briyanto, R, D; Dwifa, Y; Rahma, S; & Fera, M, Y. 2020. "Dampak Wabah Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tongkok". Dalam *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 5, No. 2. Samarinda: Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Diakses dalam <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik>, pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 09:00 WIB.
- Choudhury, P., Koo, W, W., Li, X., Kishore, N., Balsari, S., & Khanna, T. 2020. "Food Security and Human Mobility During the Covid-19 Lockdown". United States: Harvard University. Diunduh dalam [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3600376](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600376), pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 09:47 WIB.
- CNN Indonesia. 2020. "Jejak Kota Tegal Lawan Corona: Lantang Lockdown Hingga PSBB". Diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200514134104-20-503332/jejak-kota-tegal-lawan-corona-lantang-lockdown-hingga-psbb>, pada tanggal 15 Mei 2020, pukul 5:55 WIB.
- Dzulfaroh, A, N. 2020. "Daftar Wilayah di Indonesia yang Terapkan Local Lockdown". Diakses dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-?page=all>, pada tanggal 1 April 2020, pukul 14:37 WIB.

- Ihsanuddin. 2020. "Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown". Diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/05405561/jokowi-akhirnya-blak-blakan-soal-alasan-tak-mau-lockdown?page=all>, pada tanggal 1 April 2020, pukul 21:08 WIB.
- Ihsanuddin. 2020. "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia". Diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>, pada tanggal 1 April 2020, pukul 05:28 WIB.
- Nugraha, Aji Satria. 2020. "Kearifan Lokal dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur". *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 10. No. 1. Pp. 745-753. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Diunduh dalam <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/>, pada tanggal 15 Mei 2020, pukul 05:23 WIB.
- Supriyadi. 2016. "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan". *Lentera Pustaka*. Vol. 2. No. 2. Pp. 83-93. Semarang: Universitas Diponegoro. Diunduh dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/article/viewFile/13476/10162>, pada tanggal 17 Maret 2020, pukul 03.44 WIB.
- Valkenburg, P, M., Peter, J., & Walther, J, B. 2016. "Media Effects: Theory and Research". *Annual Review of Psychology*. Januari, 67. DOI: 10.1146/annurev-psych-122414-033608. University of Amsterdam: Netherlands. Diunduh dalam <https://www.researchgate.net/publication/281554023>, pada tanggal 2 April 2020, pukul 06:18 WIB.